

**PENGARUH KRISIS LEGITIMASI DOMESTIK TERHADAP KEPUTUSAN
ESKALASI MILITER: STUDI KASUS OPERASI *RISING LION* ISRAEL TAHUN
2025**

Putri Wulandari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
151240059@student.upnyk.ac.id

Submitted: 5th July 2025 | Accepted: 8th April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika di balik Operasi *Rising Lion* Israel terhadap Iran pada Juni 2025 yang terjadi di tengah gejolak politik domestik. Menggunakan kerangka teori *Diversionary War*, riset ini bertujuan untuk mengkaji interaksi antara krisis legitimasi domestik, konstruksi ancaman eksternal, dan respons publik dalam membentuk momentum eskalasi militer Israel pada 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif berbasis data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa rasionalitas keamanan Israel terjalin erat dengan kebutuhan survival politik elit, di mana keberhasilan operasional penghancuran fasilitas nuklir dikonstruksi sebagai narasi untuk memulihkan kohesi sosial. Hasil analisis mengonfirmasi lonjakan dukungan publik hingga 93 persen pascaserangan, namun efek unifikasi ini bersifat rapuh dan temporer dengan kepercayaan publik yang lebih menitikberatkan pada institusi militer dibandingkan kepemimpinan politik. Dengan demikian, operasi militer berskala tinggi “*Rising Lion*” dapat dipahami sebagai mekanisme pengalihan konflik yang berfungsi meredam tekanan disintegrasi internal dalam jangka pendek.

Kata Kunci: Israel-Iran 2025, *Diversionary War*, Propaganda Politik, *Rally around the flag*, Operasi *Rising Lion*.

ABSTRACT

This research analyzes the dynamics behind Israel's "Operation Rising Lion" against Iran in June 2025, which occurred amidst domestic political turmoil. Using the Diversionary War theoretical framework, this study aims to examine the interaction between domestic legitimacy crises, the construction of external threats, and public responses in shaping the momentum of Israel's military escalation in 2025. The research method employs a qualitative approach with a descriptive case study type based on secondary data. Findings show that Israel's security rationality is intertwined with the political survival needs of the elite, where the operational success of destroying nuclear facilities was constructed as a narrative to restore social cohesion. The analysis confirms a surge in public support reaching 93 percent post-attack. However, this unification effect

is fragile and temporary, with public trust weighing more heavily on military institutions than on political leadership. Thus, the "Rising Lion" operation can be understood as a short-term diversionary mechanism to mitigate internal political fragmentation.

Keywords: Israel-Iran 2025, Diversionary War, Political Survival, Rally around the flag, Operation Rising Lion.

PENDAHULUAN

Hubungan antara ketidakstabilan politik domestik dan perilaku agresif negara dalam kancah internasional telah lama menjadi subjek perdebatan dalam studi hubungan internasional (Blomdahl, 2017; Saliaka, 2025). Fenomena ini mencapai titik baru di Timur Tengah pada pertengahan tahun 2025, ketika Israel meluncurkan "Operasi *Rising Lion*" terhadap Iran. Operasi militer yang diluncurkan pada 13 Juni 2025 ini menjadi eskalasi konfrontasi militer secara langsung, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kedua negara yaitu Israel dan Iran (Golkar, 2025). Di lain sisi, analisis militer global memuji keberhasilan taktis operasi tersebut dalam menghancurkan fasilitas nuklir dan pertahanan udara Iran, sehingga peristiwa ini tidak terjadi secara begitu saja (Hayman, 2025; Schiff, 2025). Operasi ini diwarnai oleh gejolak internal di Israel, di mana pemerintah yang saat ini sedang menjabat serta para koalisi menghadapi krisis legitimasi terburuk dalam sejarah negara tersebut akibat polarisasi sosial dan upaya perombakan sistem peradilan (Elran & Michael, 2023; Feldman, 2025).

Secara teoritis dan normatif, keputusan negara demokrasi untuk melancarkan perang, seharusnya didasarkan pada kalkulasi keamanan nasional yang rasional, objektif, dan terukur terhadap ancaman eksistensial (Khachatryan, 2025). Dalam kondisi normal idealnya, kebijakan luar negeri dan pertahanan harus terisolasi dari kepentingan kelangsungan hidup politik jangka pendek para pemimpinnya. Namun, realita yang terjadi di Israel pada tahun 2025 menunjukkan adanya realitas yang berkebalikan dari norma tersebut. Data menunjukkan bahwa keputusan untuk menyerang Iran diambil pada saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan koalisinya menghadapi tekanan domestik yang besar yang dapat disebut "*perfect storm*" (Feldman, 2025). Sebelum perang dimulai, Israel dilanda protes massa yang melibatkan jutaan warga, pemogokan umum, dan ketidakpercayaan publik yang meluas terhadap institusi negara akibat reformasi peradilan yang kontroversial, serta adanya isu pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks (Feldman, 2025). Terdapat indikasi kuat bahwa narasi ancaman nuklir Iran dikonstruksi dan diakselerasi bukan hanya sebagai respon terhadap kapabilitas teknis Iran, tetapi juga sebagai instrumen untuk meredam disintegrasi sosial internal. Kesenjangan antara justifikasi keamanan yang rasional dan *timing* operasi yang bertepatan dengan krisis politik inilah yang menjadi inti permasalahan penelitian ini (Shomer dkk., 2025).

Literatur mengenai hubungan antara ketidakstabilan domestik dan konflik internasional sering kali menyoroiti bagaimana elite politik memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk mengamankan kelangsungan kekuasaan mereka. Dalam konteks eskalasi Israel-Iran pada tahun 2025, tinjauan terhadap penelitian empiris mengungkapkan

dinamika kausal yang kompleks antara krisis legitimasi internal, konstruksi narasi ancaman melalui operasi militer, dan fluktuasi dukungan publik terhadap pemerintahan Israel.

Pada berbagai studi yang penulis analisis, isi penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa keputusan untuk melancarkan agresi militer eksternal tidak terjadi semata-mata atas balasan atas serangan Iran terhadap Israel, melainkan berakar kuat pada dinamika tekanan politik domestik yang terjadi di Israel. Konsensus akademik mendeskripsikan kondisi Israel pada paruh pertama 2025 sebagai "*perfect storm*" atau badai sempurna polarisasi dan *Executive Aggrandizement* (perluasan kekuasaan eksekutif), di mana pemerintah menggunakan narasi keamanan untuk menutupi erosi demokrasi, kegagalan kebijakan pasca 7 Oktober, serta tekanan dari ketergantungan bantuan militer AS yang belum terselesaikan (Feldman, 2025; Shomer dkk., 2025; Zanotti, 2024). Akumulasi dari delegitimasi hukum dan protes massa ini menciptakan urgensi bagi elite politik untuk mencari "katup pelepasan" eksternal guna mengalihkan perhatian publik.

Agar strategi pengalihan ini efektif, literatur menunjukkan perlunya variabel perantara berupa konstruksi narasi ancaman eksistensial yang divalidasi oleh keberhasilan operasional militer. Penelitian menyoroti bahwa legitimasi perang dibangun melalui kombinasi narasi ancaman nuklir yang mendesak dan eksekusi taktis, seperti "dekapitasi" kepemimpinan musuh dan pencapaian superioritas udara total tanpa korban jiwa di pihak sendiri, yang kemudian dibingkai sebagai bukti kompetensi mutlak pemerintah (Mills & Curtis, 2025; Reddy dkk., 2025; Wald dkk., 2025). Keberhasilan teknis di lapangan menjadi prasyarat mutlak untuk memvalidasi narasi politik kepada masyarakat domestik.

Dampak dari strategi ini terhadap variabel dependen yang berupa dukungan dari publik domestik, terbukti signifikan secara statistik namun sangat terbatas oleh realitas kontekstual jangka panjang. Studi kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan, menemukan adanya fenomena *rally around the flag* dengan indeks yang kuat, di mana dukungan publik dan kepercayaan terhadap pemimpin melonjak drastis saat operasi dimulai, namun efek ini bersifat sementara. Hal ini terjadi, karena pada kenyataan pasca-konflik seperti pengetahuan nuklir musuh yang tetap utuh dan ketiadaan rencana tata kelola jangka panjang, ini segera mengembalikan fokus publik pada masalah internal yang belum selesai (Golkar, 2025; Loft, 2025; Makar & Pillah, 2025; Shapira dkk., 2025).

Meskipun kedua klaster literatur tersebut kaya akan data empiris, belum adanya penelitian yang mensintesis hubungan kausalitas di antara keduanya. Literatur yang ada belum secara memadai menjelaskan bagaimana konstruksi narasi ancaman nuklir digunakan secara strategis sebagai variabel mediasi untuk mengubah ketidakpuasan publik akibat isu peradilan menjadi dukungan patriotik (Golkar, 2025). Kesenjangan literatur inilah yang menjadi fokus penelitian, yaitu ketiadaan penjelasan yang menghubungkan keberhasilan taktis di lapangan dengan motif *survival* politik elit penguasa.

Mengkaji masalah ini krusial karena memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman studi keamanan internasional. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya demarkasi yang jelas antara kebijakan keamanan yang didorong oleh kebutuhan strategis murni dan yang dipengaruhi oleh insentif politik domestik. Tanpa analisis kritis terhadap dinamika internal, pemahaman mengenai eskalasi konflik Israel-Iran 2025 berisiko

terjebak pada narasi keamanan permukaan, sehingga mengabaikan kompleksitas interaksi antara kelangsungan hidup rezim (*political survival*) dan keputusan kebijakan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan analisis dengan membingkai ulang serangan Israel terhadap Iran 2025 melalui lensa teori *Diversionary War*. Sesuai dengan urgensi masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana interaksi antara krisis legitimasi domestik, konstruksi ancaman eksternal, dan respons publik membentuk momentum eskalasi militer Israel pada 2025?

KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun melalui sintesis antara *Diversionary War Theory* dan *Rally Around the Flag Effect* untuk menjelaskan hubungan antara krisis legitimasi domestik dan keputusan eskalasi militer Israel terhadap Iran pada Juni 2025. Berbeda dari pendekatan deskriptif, kerangka ini diposisikan sebagai model analisis yang menghubungkan variabel-variabel empiris secara sistematis, yaitu krisis legitimasi domestik sebagai variabel independen, konstruksi narasi ancaman sebagai *variabel intervening*, dan respons publik sebagai variabel dependen.

Gambar 1. Visualisasi Diagram Alur Penelitian



Sumber: Penulis

Dalam kerangka ini, krisis legitimasi domestik tidak dipahami secara abstrak, tetapi dioperasionalkan melalui beberapa indikator empiris, yaitu: (1) konflik institusional yang tercermin dalam upaya *executive aggrandizement* dan perdebatan mengenai reformasi peradilan, (2) intensitas protes massa dan fragmentasi sosial, serta (3) penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana tekanan domestik mencapai tingkat yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Feldman, 2025; Shomer dkk., 2025).

Tekanan domestik tersebut, dalam perspektif *Diversionary War Theory*, menciptakan insentif bagi elite politik untuk mengalihkan perhatian publik melalui eskalasi konflik eksternal (Blomdahl, 2017; Saliaka, 2025). Namun, penelitian ini tidak hanya melihat eskalasi militer sebagai tindakan langsung, melainkan sebagai proses yang dimediasi oleh konstruksi narasi ancaman. Variabel *intervening* ini dioperasionalkan

melalui dua indikator utama, yaitu: (1) *framing* ancaman eksistensial dalam wacana politik dan keamanan (khususnya terkait ancaman *nuclear breakout* dan serangan rudal Iran) serta (2) validasi narasi melalui keberhasilan operasional militer, seperti penghancuran fasilitas nuklir, dekapitasi kepemimpinan militer, dan pencapaian superioritas udara (Mills & Curtis, 2025; Wald dkk., 2025). Dengan demikian, narasi ancaman tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme yang menghubungkan tekanan domestik dengan legitimasi eskalasi eksternal.

Selanjutnya, keberhasilan konstruksi narasi dan operasi militer tersebut berdampak pada variabel dependen berupa respons publik, yang dianalisis melalui konsep *Rally Around the Flag Effect*. Variabel ini dioperasionalkan melalui indikator kuantitatif berupa tingkat dukungan publik terhadap operasi militer dan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, yang diukur melalui data survei opini publik. Dalam konteks ini, efek *rally* diidentifikasi melalui lonjakan dukungan terhadap kebijakan militer dan peningkatan kepercayaan terhadap institusi pertahanan, serta dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan politik (Shapira dkk., 2025). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana kohesi sosial terbentuk dan kepada aktor mana legitimasi tersebut diarahkan.

Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, kerangka ini mengajukan proposisi bahwa krisis legitimasi domestik meningkatkan insentif bagi elite politik untuk melakukan eskalasi eksternal, yang dimediasi oleh konstruksi narasi ancaman dan divalidasi melalui keberhasilan operasional militer, sehingga menghasilkan peningkatan dukungan publik yang bersifat temporer. Dengan demikian, keputusan eskalasi militer dalam kasus Israel 2025 tidak hanya dapat dipahami sebagai respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik domestik yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk menganalisis hubungan antara krisis legitimasi domestik dan keputusan eskalasi militer Israel terhadap Iran pada tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses dan makna di balik pengambilan keputusan politik dalam konteks yang spesifik, bukan pada pengujian hubungan kausal secara statistik.

Unit analisis penelitian ini adalah dinamika politik dan keamanan Israel selama periode krisis domestik dan eskalasi militer tahun 2025. Studi ini menggunakan desain *instrumental case study*, di mana kasus Operasi *Rising Lion* diperlakukan sebagai sarana untuk memahami fenomena yang lebih luas, yaitu praktik *diversionary war* dalam konteks negara demokrasi yang mengalami tekanan legitimasi domestik.

Penelitian ini berfokus pada periode Januari hingga Agustus 2025, yang mencakup fase pra-konflik, pelaksanaan operasi militer, dan dampak pasca-konflik. Batasan temporal ini memungkinkan analisis keterkaitan antara intensitas krisis domestik, timing eskalasi militer, serta perubahan respons publik dalam satu rangkaian peristiwa yang terintegrasi.

Data penelitian bersumber dari dokumen sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Sumber utama meliputi laporan kebijakan dan analisis akademik dari lembaga *think tank* dan jurnal ilmiah yang membahas situasi domestik dan militer Israel (Feldman, 2025; Shomer dkk., 2025; Wald dkk., 2025), laporan resmi pemerintah dan lembaga internasional seperti Congressional Research Service (CRS) dan IAEA (Mills & Curtis, 2025; Zanotti, 2024), serta arsip media, transkrip pidato, dan data survei opini publik yang merekam dinamika persepsi masyarakat selama periode konflik (Reddy dkk., 2025; Shapira dkk., 2025).

Analisis data dilakukan dengan mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif (B. Miles & Huberman, 2014). Dalam penelitian ini, proses kondensasi data dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan variabel dalam kerangka analisis, yaitu krisis legitimasi domestik, konstruksi narasi ancaman, dan respons publik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk pola hubungan antarvariabel untuk mengidentifikasi keterkaitan antara tekanan domestik dan eskalasi militer. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelusuri konsistensi temuan antarsumber serta kesesuaiannya dengan kerangka teoretis yang digunakan.

PEMBAHASAN

Temuan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber sekunder mengenai Perang Israel-Iran 2025 disajikan secara deskriptif untuk memetakan tiga variabel utama penelitian, yaitu: (1) kondisi krisis politik domestik Israel sebelum perang, (2) pelaksanaan dan narasi Operasi *Rising Lion* sebagai variabel *intervening*, dan (3) respons publik Israel terhadap operasi tersebut sebagai variabel dependen.

Intensitas Krisis Domestik sebagai Kondisi Struktural

Mengacu pada *Diversionary War Theory*, ketidakstabilan politik di dalam negeri sering kali menjadi sebab yang mendorong pemimpin untuk mengalihkan fokus publik melalui manuver luar negeri yang agresif. Fenomena ini terjadi di Israel sepanjang semester pertama tahun 2025, di mana pemerintah menghadapi krisis multidimensi berupa erosi legitimasi, fragmentasi sosial, serta sengketa kelembagaan akibat isu reformasi hukum. Eskalasi unjuk rasa dan perseteruan wewenang antara eksekutif dan yudikatif telah menciptakan guncangan serius terhadap keberlangsungan pemerintahan.

Temuan data menunjukkan bahwa pada periode enam bulan sebelum pecahnya perang, situasi politik Israel didominasi oleh ketidakstabilan internal. Analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan akademis mengidentifikasi tiga indikator utama krisis legitimasi yang dihadapi pemerintah Israel yaitu polarisasi sosial akibat reformasi peradilan, protes massa, dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Dengan demikian, kondisi pra-perang tersebut memperkuat asumsi bahwa tekanan internal menjadi faktor struktural yang mendorong aktivasi mekanisme pengalihan konflik eksternal.

Data dari Shomer, Tzelgov, dan Zur (2025) mengonfirmasi adanya persepsi krisis demokrasi yang mendalam, ditandai dengan upaya *Executive Aggrandizement* atau disebut

perluasan kekuasaan eksekutif yang memicu perdebatan konstitusional (Shomer dkk., 2025). Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan situasi ini sebagai badai sempurna (*perfect storm*) domestik yang menekan stabilitas koalisi di pemerintahan (Feldman, 2025).

Kondisi internal Israel pada paruh pertama tahun 2025 ditandai oleh konvergensi tiga dimensi krisis utama yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu krisis institusional, ketidakstabilan sosial, dan delegitimasi pemerintah. Pada dimensi krisis institusional, temuan menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah koalisi untuk merestrukturisasi keseimbangan kekuasaan melalui reformasi peradilan. Menurut analisis peneliti, langkah-langkah legislatif ini dipersepsikan bukan sekadar reformasi hukum, melainkan sebagai bentuk *Executive Aggrandizement* yang berupaya melemahkan mekanisme *checks and balances* peradilan (Shomer dkk., 2025). Dinamika ini berfungsi sebagai komponen utama dari "*perfect storm*" domestik, di mana perdebatan mengenai wewenang Mahkamah Agung telah memicu polarisasi ekstrem mengenai identitas demokrasi negara antara pendukung koalisi sayap kanan dan oposisi (Feldman, 2025).

Dimensi kedua, ketidakstabilan sosial yang digambarkan melalui gelombang protes massa yang berkelanjutan dan fragmentasi sosial. Data menunjukkan bahwa resistensi publik terhadap kebijakan pemerintah telah menciptakan retakan sosial yang mengancam kohesi nasional, bahkan sebelum eskalasi konflik eksternal terjadi. Sebagaimana dicatat oleh Zanotti (2024), ketegangan ini menjadi semakin parah dikarenakan pengaruh elemen ultra-nasionalis dalam pemerintahan serta perdebatan internal koalisi mengenai isu wajib militer bagi komunitas Haredi, yang semakin memperdalam jurang pemisah antara berbagai segmen masyarakat Israel (Zanotti, 2024). Protes-protes ini mencerminkan fragmentasi sosial yang mendalam, di mana puluhan ribu tentara cadangan mengancam untuk menolak bertugas sebagai bentuk perlawanan terhadap langkah pemerintah (Feldman, 2025).

Indikator ketiga, delegitimasi pemerintah. Hal ini tercermin dari kesenjangan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Temuan data survei yang dianalisis oleh Shapira dkk. (2025) mengungkapkan bahwa sebelum peluncuran Operasi *Rising Lion*, Israel berada dalam konteks domestik yang ditandai oleh ketegangan masyarakat yang berkepanjangan dan terpolarisasi. Data menunjukkan adanya disparitas antara kepercayaan publik terhadap institusi militer (IDF) yang tetap tinggi, dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang bersifat fluktuatif dan cenderung rendah terhadap institusi politik seperti Pemerintah dan Knesset. Dari ketiga indikator ini menunjukkan bahwa sebelum operasi militer dimulai, pemerintah menghadapi tekanan yang secara nyata mengancam kelangsungan dan stabilitas koalisi pemerintahan.

Operasi *Rising Lion* sebagai Variabel *Intervening*: Konstruksi Narasi Ancaman

Dalam kerangka *Diversionsary War*, eskalasi militer tidak hanya bergantung pada keberadaan ancaman objektif, tetapi juga pada bagaimana ancaman tersebut dikonstruksi, dipersepsikan, dan dikomunikasikan sebagai ancaman eksistensial. Dalam kasus Israel 2025, temuan menunjukkan bahwa ancaman yang dimaksud tidak tunggal, melainkan

terdiri dari dua dimensi utama, yaitu percepatan program nuklir Iran menuju *nuclear breakout* dan potensi serangan rudal langsung terhadap wilayah Israel.

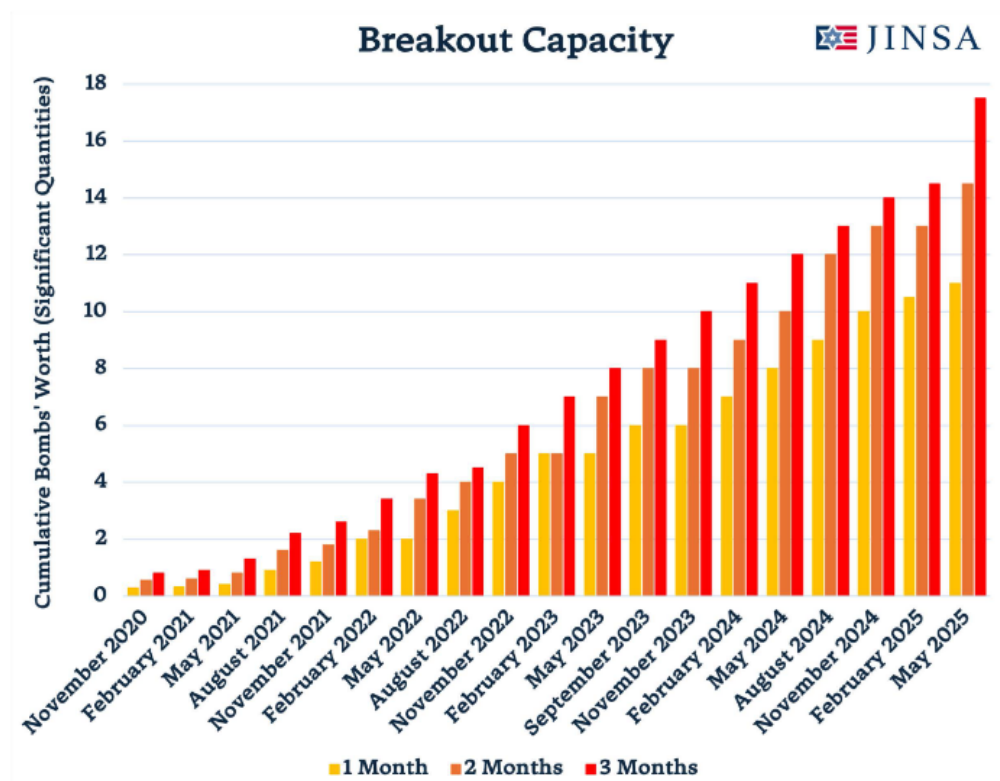
Pernyataan resmi pemerintah saat peluncuran operasi pada 13 Juni 2025 menunjukkan bagaimana narasi ancaman dikonstruksi secara eksplisit oleh elite politik. Dalam pidato publiknya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk menargetkan program nuklir dan kapabilitas rudal Iran, yang ia gambarkan sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan Israel. Ia menyatakan bahwa Iran berada pada titik yang semakin dekat untuk memproduksi senjata nuklir dan bahwa jika tidak dihentikan, hal tersebut akan menjadi “bahaya nyata dan langsung bagi keberadaan Israel” (Dov, 2025). Selain itu, Netanyahu juga menekankan bahwa Israel “tidak memiliki pilihan selain bertindak sekarang,” yang menunjukkan bagaimana urgensi ancaman digunakan untuk membenarkan tindakan militer *pre-emptive* (Borger dkk., 2025).

Narasi ancaman terkait program nuklir Iran yang dibangun oleh Israel tidak muncul secara spontan, melainkan berakar pada kombinasi faktor strategis, ideologis, dan psikologis dalam lingkungan keamanan regional. Dalam banyak kajian, Iran diposisikan oleh Israel sebagai tantangan keamanan utama yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis, mengingat retorika anti-Israel yang secara eksplisit mempertanyakan legitimasi keberadaan negara tersebut (Kaye dkk., 2012). Dalam konteks ini, potensi kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dipersepsikan sebagai ancaman yang dapat secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata langsung.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh pandangan di kalangan komunitas strategis Israel, bahwasannya penggunaan senjata nuklir oleh Iran di masa depan tidak sepenuhnya dapat dikesampingkan, baik dalam skenario disengaja maupun akibat eskalasi krisis. Selain itu, absennya mekanisme stabilitas seperti *mutually assured destruction* sebagaimana dalam konteks Perang Dingin membuat ancaman tersebut dipersepsikan lebih tidak terprediksi dan berisiko tinggi (Eisenstadt & Fellow, 2017; Kaye dkk., 2012). Dalam kondisi demikian, narasi ancaman menjadi instrumen penting untuk mbingkai situasi sebagai keadaan darurat yang memerlukan respons luar biasa.

Narasi ini juga diperkuat oleh meningkatnya kecemasan terhadap perkembangan kemampuan militer Iran dan pengaruh regionalnya yang terus meluas. Bagi Israel, kombinasi antara potensi nuklir, kemampuan rudal, serta dukungan terhadap aktor proksi di kawasan menciptakan persepsi bahwa ruang manuver strategisnya semakin menyempit (Eisenstadt & Fellow, 2017; Kaye dkk., 2012). Dalam situasi yang dipersepsikan semakin mengisolasi tersebut, opsi tindakan militer seperti serangan *preemptive* terhadap fasilitas nuklir diposisikan sebagai langkah yang rasional dalam kerangka *self-defense* dan pencegahan. Logika ini sejalan dengan konsep perang preventif yang menekankan prinsip “*better now than later*”, yaitu keyakinan bahwa tindakan militer perlu dilakukan sebelum lawan mencapai titik perubahan kekuatan yang tidak dapat dibalik, terutama dalam konteks proliferasi nuklir yang dipandang sebagai pergeseran kekuatan paling konsekuensial (Levy, 2011).

Gambar 2. Perkembangan Waktu Breakout dan Kapasitas Nuklir Iran (2018-2025).



Sumber: (Wald dkk., 2025)

Data tersebut digunakan pemerintah Israel untuk menciptakan rasa urgensi nasional (Saliaka, 2025). Narasi bahwa Iran telah mendekati kemampuan senjata nuklir dan berpotensi melancarkan serangan balistik digunakan sebagai instrumen *framing* eksistensial dalam variabel *intervening* guna menjembatani krisis legitimasi domestik dengan mobilisasi dukungan publik (Wald dkk., 2025). Konstruksi narasi ini secara cepat mengubah lanskap psikologis masyarakat Israel. Dengan membingkai situasi sebagai pilihan biner antara bertindak sekarang atau musnah (*act or perish*), elite politik berhasil mengalihkan fokus publik dari perdebatan mengenai kualitas demokrasi menuju konsensus tentang kelangsungan hidup sebuah negara. Peringatan mengenai potensi serangan Iran kemudian memberikan landasan moral dan hukum yang kuat bagi Israel untuk melancarkan serangan n serta meredam kritik oposisi yang sebelumnya sangat vokal (Reddy dkk., 2025).

Pengalaman historis Israel sendiri memperkuat logika tersebut. Serangan terhadap reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 mencerminkan bagaimana ancaman nuklir dipahami bukan sekadar sebagai risiko jangka panjang, tetapi sebagai bahaya yang harus dicegah sebelum terwujud. Perdana Menteri Menachem Begin memandang bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Irak akan menciptakan ancaman yang tidak dapat ditangkal, sehingga

tindakan preventif menjadi pilihan yang rasional meskipun berisiko menimbulkan isolasi diplomatik (Levy, 2011). Dalam konteks ini, bahkan peringatan mengenai potensi isolasi internasional tidak mengurangi urgensi tindakan, karena ancaman eksistensial dipersepsikan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya politik yang mungkin timbul.

Dalam kerangka pemikiran ini, tindakan militer preventif tidak semata dipahami sebagai agresi, melainkan sebagai respons rasional terhadap ancaman yang dipersepsikan akan mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis dan membahayakan keberlangsungan negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama yang melibatkan isu nuklir, negara dapat memprioritaskan logika pencegahan dan keamanan eksistensial di atas pertimbangan diplomatik, sehingga narasi ancaman berfungsi untuk melegitimasi tindakan luar biasa dalam kerangka pertahanan diri.

Dalam konteks ini, narasi ancaman tidak hanya berfungsi sebagai dasar justifikasi tindakan militer, tetapi juga menciptakan ekspektasi terhadap efektivitas respons yang diambil. Narasi ancaman eksistensial ini kemudian diperkuat dan divalidasi melalui keberhasilan operasional militer di lapangan. Data menunjukkan bahwa Operasi Rising Lion tidak hanya menargetkan fasilitas nuklir, tetapi juga kepemimpinan militer strategis Iran melalui strategi *decapitation*, serta berhasil mencapai superioritas udara dan dominasi intelijen secara menyeluruh (Reddy dkk., 2025). Keberhasilan penghancuran fasilitas di Natanz dan Isfahan, serta eliminasi pimpinan IRGC, tidak hanya memiliki dampak militer, tetapi juga berfungsi sebagai bukti empiris yang memperkuat kredibilitas narasi ancaman pemerintah (Hayman, 2025; Mills & Curtis, 2025).

Keberhasilan taktis ini dapat dipahami sebagai mekanisme yang memperkuat legitimasi kebijakan, di mana narasi ancaman yang sebelumnya bersifat diskursif memperoleh penguatan melalui hasil konkret di medan operasi. Dengan kata lain, tindakan militer tidak hanya merespons ancaman, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi publik bahwa ancaman tersebut nyata dan memerlukan penanganan segera. Dalam literatur, keberhasilan operasi militer diketahui dapat meningkatkan dukungan domestik dan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, terutama ketika tindakan tersebut dipersepsikan efektif dan sesuai dengan tujuan keamanan nasional (Clements, 2013).

Terciptanya Operasi *Rising Lion* dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara konstruksi ancaman dan kebutuhan legitimasi domestik. Ancaman nuklir dan rudal Iran menyediakan dasar material, sementara framing sebagai ancaman eksistensial yang mendesak yang kemudian diperkuat oleh keberhasilan operasional, hal ini berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan eskalasi militer diterima secara luas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keputusan eskalasi tidak semata-mata didorong oleh imperatif keamanan objektif, tetapi juga oleh proses politik dalam membangun dan memelihara legitimasi tindakan tersebut di tingkat domestik.

Respon Publik dan Efek *Rally Around the Flag*

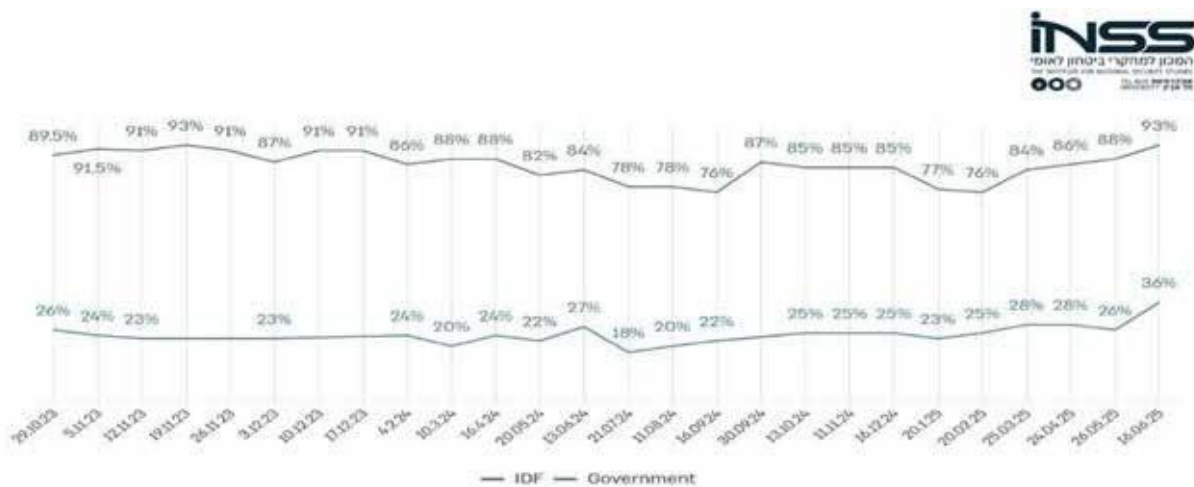
Bagian ini menyajikan data kuantitatif mengenai perubahan opini publik Israel selama dan setelah operasi militer. Data survei yang dikumpulkan oleh Institute for

National Security Studies (INSS) dan dianalisis oleh Shapira dkk. (2025) menunjukkan lonjakan dukungan yang signifikan terhadap tindakan militer yang dilakukan oleh Israel.

Survei yang dilakukan pada 15-16 Juni 2025, di tengah berlangsungnya Operasi *Rising Lion* menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi, khususnya di kalangan populasi Yahudi Israel. Dukungan terhadap operasi militer mencapai kisaran 88% hingga 93%, sementara tingkat penolakan berada di bawah 10% (Deitch dkk., 2025). Tingginya tingkat konsensus ini mencerminkan fenomena *rally around the flag*, yang merujuk pada kecenderungan peningkatan dukungan publik terhadap pemerintah dan kebijakan keamanan dalam situasi krisis eksternal. Awalnya dikonseptualisasikan sebagai lonjakan popularitas pemimpin eksekutif selama krisis internasional (Mueller, 1970), literatur selanjutnya menunjukkan bahwa efek ini tidak hanya terbatas pada peningkatan persetujuan terhadap pemimpin, tetapi juga mencakup peningkatan kepercayaan terhadap institusi negara secara lebih luas (Hetherington & Nelson, 2003).

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa dalam konteks konflik, dukungan publik juga meluas pada kebijakan militer yang sedang berlangsung. Misalnya, selama Perang Teluk dan pasca serangan 11 September, terjadi peningkatan signifikan dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah serta dukungan terhadap agenda keamanan nasional yang dijalankan. Selain itu, konsensus di kalangan elite politik (termasuk dukungan dari oposisi terhadap kebijakan keamanan) dapat memperpanjang durasi efek *rally* tersebut, karena memperkuat persepsi legitimasi dan mengurangi kontestasi politik domestik terhadap kebijakan militer (Hetherington & Nelson, 2003).

Gambar 3. Tingkat Dukungan Publik Israel Terhadap Serangan ke Iran (15-16 Juni 2025)



Sumber: (Deitch dkk., 2025)

Selain dukungan terhadap operasi, data juga menunjukkan pola diferensiasi dalam tingkat kepercayaan terhadap institusi. Kepercayaan terhadap militer (IDF) tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi, sementara kepercayaan terhadap Perdana menteri dan

pemerintah mengalami peningkatan yang lebih moderat selama periode konflik (Shapira dkk., 2025). Pola ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa institusi militer sering kali memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih stabil dibandingkan dengan aktor politik dalam konteks konflik (Chen, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya korelasi temporal yang jelas antara pelaksanaan operasi militer dan peningkatan kohesi sosial serta dukungan publik, yang mengindikasikan berfungsinya fenomena *rally around the flag* selama periode konflik. Lonjakan dukungan yang signifikan tidak hanya merefleksikan respons spontan terhadap ancaman eksternal, tetapi juga menunjukkan bagaimana krisis keamanan mampu mengonsolidasikan opini publik dalam jangka pendek.

Namun demikian, dinamika yang terjadi tidak berhenti pada tingkat publik semata. Data menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap operasi militer mencapai kisaran 88-93% di kalangan Yahudi Israel (Deitch dkk., 2025; Shapira dkk., 2025). Dalam konteks tingkat dukungan yang sangat tinggi tersebut, ruang bagi kritik politik menjadi sangat terbatas. Kritik terhadap operasi militer yang dipersepsikan berhasil secara taktis berpotensi menimbulkan biaya politik yang besar, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak patriotik. Kondisi ini menjelaskan mengapa aktor oposisi tidak hanya menahan kritik, tetapi secara aktif memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Pernyataan Yair Lapid yang menyebut operasi tersebut sebagai salah satu yang paling gemilang dalam sejarah peperangan, serta dukungan Benny Gantz terhadap pemerintah, mencerminkan adanya konsolidasi elite di tengah konflik (Breuer, 2025).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua mekanisme yang bekerja secara simultan. Pertama, tekanan opini publik yang sangat kuat menciptakan insentif bagi elite politik untuk menyesuaikan posisi mereka dengan preferensi mayoritas guna menghindari risiko elektoral. Kedua, dalam situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman serius atau bahkan eksistensial, logika kompetisi politik cenderung ditangguhkan sementara, dan digantikan oleh kebutuhan untuk menunjukkan persatuan nasional. Literatur menunjukkan bahwa oposisi dalam sistem demokrasi cenderung menahan kritik terhadap operasi militer yang berlangsung cepat, berhasil, dan memperoleh dukungan luas dari publik (Blomdahl, 2017). Dalam konteks ancaman yang lebih mendalam, kecenderungan ini menjadi semakin kuat, karena baik publik maupun elite politik memprioritaskan stabilitas dan kelangsungan negara dibandingkan dengan akuntabilitas politik jangka pendek (Saliaka, 2025). Dengan demikian, dukungan oposisi bukan semata refleksi persetujuan substantif, tetapi juga hasil dari kalkulasi strategis dalam lingkungan politik yang sangat terpolarisasi oleh isu keamanan. Temuan ini juga sejalan dengan argumen bahwa konteks perang dapat berfungsi sebagai mekanisme yang meredam perbedaan pendapat dalam sistem demokrasi (Shomer dkk., 2025).

Meskipun demikian, temuan empiris dalam kasus Israel 2025 juga menunjukkan nuansa yang memperkaya literatur mengenai *rally effect*. Berbeda dengan asumsi klasik bahwa peningkatan dukungan publik akan secara langsung memperkuat legitimasi politik pemerintah, data menunjukkan adanya diferensiasi antara dukungan terhadap perang dan kepercayaan terhadap pemerintah. Shapira dkk. (2025) menunjukkan bahwa meskipun dukungan terhadap operasi militer sangat tinggi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah

tetap lebih rendah dibandingkan dengan kepercayaan terhadap militer (Deitch dkk., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa publik mampu memisahkan antara dukungan terhadap tindakan keamanan negara dan evaluasi terhadap aktor politik, sehingga *rally effect* dalam konteks ini bersifat parsial dan tidak sepenuhnya terkonversi menjadi keuntungan politik bagi pemerintah.

Secara teoretis, kemenangan militer yang bersifat decisif (seperti yang digambarkan sebagai operasi yang sangat berhasil) seharusnya menghasilkan keuntungan politik yang lebih berkelanjutan bagi pemerintah. Namun, data menunjukkan bahwa efek tersebut cenderung bersifat sementara. Kohesi sosial yang terbentuk selama konflik mulai melemah segera setelah ancaman eksternal mereda, ditandai dengan munculnya kembali perbedaan politik dan ketegangan sosial pasca-gencatan senjata (Elran & Michael, 2023).

Fenomena ini menegaskan bahwa efek *rally* lebih tepat dipahami sebagai respons jangka pendek terhadap krisis daripada sebagai transformasi struktural dalam dukungan politik. Dengan kata lain, konsolidasi domestik yang terjadi selama konflik tidak secara otomatis berlanjut menjadi stabilitas politik jangka panjang. Sebaliknya, begitu kondisi darurat berakhir, dinamika politik kembali ke pola normal yang ditandai oleh kompetisi, kritik, dan fragmentasi.

Dengan demikian, kasus Israel 2025 menunjukkan bahwa fenomena *rally around the flag* tidak hanya memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan keamanan dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk perilaku elite politik melalui tekanan konformitas dan kalkulasi strategis. Namun, efek ini bersifat selektif dan temporer, serta tidak selalu berujung pada peningkatan legitimasi politik pemerintah secara berkelanjutan. Hal ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa dalam konteks konflik modern, dukungan publik dapat bersifat terfragmentasi, yang berupa tingginya dukungan terhadap kebijakan keamanan, tetapi tidak selalu terkonversi menjadi kepercayaan politik sehingga berakibat pada penurunan dukungan setelah ancaman mereda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Israel untuk meluncurkan Operasi Rising Lion pada Juni 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai respons terhadap ancaman eksternal, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara krisis legitimasi domestik, konstruksi narasi ancaman, dan dinamika respons publik. Eskalasi militer terjadi pada momen puncak delegitimasi politik yang ditandai oleh polarisasi sosial, konflik antar lembaga negara, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam situasi demikian, konflik eksternal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengalihkan tekanan domestik sekaligus merekonstruksi kohesi sosial melalui mobilisasi isu keamanan nasional.

Lebih lanjut, konstruksi ancaman eksistensial yang berperan sebagai mekanisme kunci yang menjembatani tekanan domestik dengan legitimasi eskalasi eksternal. Narasi ancaman ini tidak hanya dibangun melalui retorika politik, tetapi juga diperkuat oleh keberhasilan operasional militer yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, legitimasi kebijakan

pemerintah tidak hanya bersumber dari klaim ancaman, tetapi juga dari persepsi efektivitas tindakan militer yang dihasilkan. Hal ini memperkuat keyakinan publik bahwa ancaman yang dihadapi bersifat nyata dan mendesak.

Dampak dari proses tersebut tercermin dalam munculnya fenomena *Rally Around the Flag effect*, yaitu lonjakan dukungan publik terhadap kebijakan keamanan dan operasi militer. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa efek tersebut bersifat parsial dan temporer. Dukungan publik yang meningkat tidak sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan legitimasi politik pemerintah, melainkan lebih banyak terakumulasi pada institusi militer sebagai aktor yang dianggap paling kredibel dalam menjamin keamanan nasional. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran kepercayaan dari aktor politik ke aktor keamanan dalam konteks krisis.

Lebih jauh, efek unifikasi yang dihasilkan oleh konflik eksternal memiliki keterbatasan struktural. Kohesi sosial yang terbentuk selama periode konflik cenderung bersifat sementara dan mulai tererosi segera setelah intensitas ancaman menurun. Ketika ancaman eksternal mereda, fragmentasi politik domestik kembali muncul, disertai dengan meningkatnya ketegangan sosial dan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, strategi yang dikenal sebagai *Diversionary war theory* terbukti hanya efektif sebagai mekanisme stabilisasi jangka pendek, namun gagal menyelesaikan akar permasalahan legitimasi yang bersifat struktural.

Secara teoretis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi kajian Hubungan Internasional dan studi keamanan. Pertama, penelitian ini menantang asumsi klasik bahwa perang pengalihan selalu menghasilkan peningkatan popularitas pemimpin politik. Dalam konteks demokrasi yang terpolarisasi, efek rally justru lebih menguntungkan institusi negara seperti militer dibandingkan figur politik. Kedua, temuan ini memperkuat argumen *Democratic backsliding*, yang menunjukkan bahwa erosi kualitas demokrasi (seperti pelemahan lembaga yudikatif) berkorelasi dengan meningkatnya kecenderungan negara untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang agresif. Hal ini menegaskan bahwa kondisi domestik merupakan variabel penting dalam menjelaskan perilaku negara di tingkat internasional.

Implikasi praktis dari penelitian ini juga signifikan. Analisis ini menekankan pentingnya membedakan antara kebijakan keamanan yang didorong oleh kebutuhan strategis objektif dan yang didorong oleh kepentingan survival politik. Bagi para pembuat kebijakan dan diplomat, termasuk di Indonesia, pemahaman ini penting untuk menghindari jebakan narasi ancaman yang dikonstruksi oleh pihak yang berkonflik, serta untuk merumuskan strategi diplomasi dan de-eskalasi.

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya memahami eskalasi militer tidak hanya sebagai respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika politik domestik. Implikasi praktisnya, analisis terhadap stabilitas internal suatu negara menjadi krusial dalam memprediksi perilaku keamanan eksternal, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi diplomasi dan de-eskalasi konflik yang lebih kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Miles, M., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022>
- Blomdahl, M. (2017). Diversionary Theory of War and the Case Study Design: President Clinton's Strikes on Iraq and Yugoslavia. *Armed Forces & Society*, 43(3), 545–565. <https://doi.org/10.1177/0095327X16651866>
- Borger, J., Beaumont, P., & Parent, D. (2025, Juni 13). Israeli strikes hit more than 100 targets in Iran including nuclear facilities. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/13/israel-strikes-iran-nuclear-program-netanyahu>
- Breuer, E. (2025, Juni 24). *Opposition lauds "Operation Rising Lion," call for return of hostages | The Jerusalem Post*. The Jerusalem Post | JPost.Com. <https://www.jpost.com/israel-news/article-858874>
- Chen, S. (2024). The impact of green trade barriers on China's photovoltaic products exports to ASEAN. *Frontiers in Environmental Science*, 12(October), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1459950>
- Clements, B. (2013). Public Opinion and Military Intervention: Afghanistan, Iraq and Libya. *The Political Quarterly*, 84(1), 119–131. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2013.02427.x>
- Deitch, M., Gittleman, I. S., Shapira, A., Gitlin, A., & Prayzler, N. (2025, Juni 22). *The Israeli Public and the Campaign Against Iran: Survey Results—June 2025 | INSS*. <https://www.inss.org.il/publication/survey-june-2025/>
- Dov, Y. (2025, Juni 13). *PM Netanyahu Explains Goal Of 'Rising Lion': 'Clear and Present Threat To Israel's Survival' - VINnews*. <https://vinnews.com/2025/06/13/pm-netanyahu-explains-goal-of-rising-lion-clear-and-present-threat-to-israels-survival/>
- Eisenstadt, M., & Fellow, K. (2017). *Testing the Limits: Iran's Ballistic Missile Program, Sanctions, and the IRGC*. <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20170329/105800/HHRG-115-FA13-Wstate-EisenstadtM-20170329.pdf>

- Elran, M., & Michael, K. (2023, September). *The Formative Socio-Political Crisis in Israel: Implications for National Security* | INSS. https://www.inss.org.il/strategic_assessment/political-social-crisis/
- Feldman, S. (2025). Israel's Domestic "Perfect Storm." *Crown Center for Middle East Studies*. <https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/meb165.html>
- Golkar, S. (2025). Humiliation and Transformation: The Islamic Republic After the 12-Day War. *Foreign Policy Research Institute*, 1–8.
- Hayman, T. (2025, Juli 9). *Operation Rising Lion: Achievements, Open Questions, and Future Scenarios* | INSS. <https://www.inss.org.il/publication/rising-lion-analysis/>
- Hetherington, M. J., & Nelson, M. (2003). Anatomy of a Rally Effect: George W. Bush and the War on Terrorism. *PS: Political Science and Politics*, 36(1), 37–42.
- Kaye, D. D., Nader, A., & Roshan, P. (Ed.). (2012). *Israel and Iran: A dangerous rivalry*. RAND.
- Khachatryan, D. (2025). Israel's Rising Lion: Toward a Preventive Jus Ad Bellum? *Völkerrechtsblog*. <https://doi.org/10.17176/20250717-143032-0>
- Levy, J. (2011). Preventive War: Concept and Propositions. *International Interactions - INT INTERACT*, 37, 87–96. <https://doi.org/10.1080/03050629.2011.546716>
- Loft, P. (2025). Iran: Impacts of June 2025 Israel and US strikes and outlook. *House of Commons Library*. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10292/CBP-10292.pdf>
- Makar, D. T., & Pillah, T. P. (2025). Twelve Days of Escalation: Analyzing the June 2025 Israel-Iran War and U.S. Precision Strikes on Nuclear Infrastructure. *IRASS Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 2(7), 1–12.
- Mills, C., & Curtis, J. (2025). Israel-Iran 2025: Developments in Iran's nuclear programme and military action. *House of Commons Library*. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10284/>
- Mueller, J. E. (1970). Presidential Popularity from Truman to Johnson. *The American Political Science Review*, 64(1), 18–34. <https://doi.org/10.2307/1955610>

- Reddy, R., Rezaei, B., Moore, J., Ganzeveld, A., & Carter, B. (2025). Iran Update Special Report. *Institute for the Study of War*, 1–11.
- Saliaka, I. (2025, Juni 19). Crisis and Cohesion: Understanding the Rally-Around-the-Flag Effect Through the Israeli Experience. *Strategy International · Think Tank & Consulting Services*.
<https://strategyinternational.org/2025/06/19/publication185/>
- Schiff, B. (2025, Juli 1). Disruption or Dismantlement: Diverging Assessments of Iran Nuclear Strikes. *Nuclear Network*. <https://nuclearnetwork.csis.org/disruption-or-dismantlement-diverging-assessments-of-iran-nuclear-strikes/>
- Shapira, A., Gittleman, I. S., Assraf, Y., & Karniely, D. (2025). The Domestic Response to Operation “Rising Lion.” *Foreign Policy Research Institute*, 1–12.
- Shomer, Y., Tzelgov, E., & Zur, R. (2025). Editorial: The crises of the Israeli democracy. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1627969>
- Wald, G. C., Fox, V. M., & Ashley, L. R. (2025). *Operation Rising Lion: Insights from Israel’s 12-Day War Against Iran*. https://jinsa.org/jinsa_report/insights-from-12-day-war/
- Zanotti, J. (2024). *Israel: Major Issues and U.S. Relations*. <https://www.congress.gov/crs-product/R44245>